



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 TAHUN 1984**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk memberikan petunjuk-petunjuk pengarahannya bagi Delegasi Republik Indonesia ke Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam di Casablanca tahun 1984.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 .

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada :

Delegasi Republik Indonesia ke Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam di Casablanca tahun 1984.

Untuk :

PERTAMA :

Mempergunakan Petunjuk-petunjuk Pengarahannya sebagaimana terlampir pada Instruksi Presiden ini sebagai landasan dan pedoman dalam menghadapi masalah-masalah yang dibahas pada Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam di Casablanca tahun 1984.

KEDUA :

Memberikan laporan kepada Presiden tentang perkembangan Konferensi selama berlangsungnya Konferensi tersebut ;

KETIGA :

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden ;

KEEMPAT :

Instruksi Presiden ini berlaku selama Delegasi Republik Indonesia menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam di Casablanca tahun 1984.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Januari 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PETUNJUK-PETUNJUK PENGARAHAN
BAGI DELEGASI REPUBLIK INDONESIA KE KONPERENSI
TINGKAT TINGGI ORGANISASI KONPERENSI ISLAM
DI CASABLANCA TAHUN 1984**

PENDAHULUAN

1. Organisasi Konperensi Islam merupakan suatu forum internasional yang penting dalam membela kepentingan negara-negara Islam atau negara-negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam untuk memperjuangkan kembalinya Al Quds dan memulihkan kembali hak-hak rakyat Palestina dari kekuasaan Israel dan dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia berdasarkan keadilan, bebas dari perbedaan ras, diskriminasi dan penindasan serta untuk memupuk solidaritas dan kerjasama antara negara anggota dalam berbagai bidang .
2. Organisasi Konperensi Islam telah ikut memainkan peranannya dalam dunia Internasional baik dalam usaha penyelesaian masalah-masalah politik bagi pemeliharaan perdamaian dunia maupun dalam usaha menciptakan Tata Ekonomi Dunia Baru. Organisasi Konperensi Islam juga telah ikut membantu meningkatkan usaha-usaha negara anggota dalam pembangunan nasionalnya, terutama dalam bidang ekonomi dan sosial budaya.
3. Dalam pada itu Organisasi Konperensi Islam masih saja diliputi oleh pertikaian-pertikaian antara negara-negara anggota, termasuk akhir-akhir ini perpecahan dalam tubuh PLO yang telah memperlemah Organisasi Konperensi Islam dalam perjuangan mencapai tujuannya. Dalam pada itu resesi ekonomi dunia yang sedang berlangsung mempunyai pengaruh negatif pula terhadap kegiatan-kegiatan Organisasi Konperensi Islam di bidang ekonomi dan sosial budaya.
4. KTT Casablanca menjadi penting karena diadakan pada waktu dunia sedang menghadapi situasi yang mengkhawatirkan, bahkan dapat membahayakan peradaban dunia, serta ditengah-tengah suasana memuncaknya bahaya di Timur Tengah dan perpecahan antara sesama negara-negara Arab.

UMUM

1. Sesuai dengan dasar politik luar negeri Indonesia yang secara konsekuen menentang penjajahan, serta ikut mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian, kemerdekaan dan keadilan sosial, yang dijabarkan dalam politik luar negeri yang bebas dan aktif yang diabdikan kepada kepentingan nasional, Indonesia perlu secara aktif memberikan sumbangan pikiran bagi pemecahan berbagai permasalahan yang dihadapi Organisasi Konperensi Islam
2. Dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam Organisasi Konperensi Islam, Indonesia hendaklah melakukan kerjasama sebaik-baiknya dengan negara-negara yang sehaluan dengan politik luar negeri Indonesia. Mengenai masalah yang mungkin menyangkut wilayah Asia Tenggara/ ASEAN, agar Indonesia bersama dengan negara lain khususnya dengan Malaysia tetap memelihara kepentingan ASEAN.
3. Kesempatan hadir pada KTT Casablanca hendaklah dipergunakan untuk lebih memperkenalkan Indonesia, khususnya mengenai usaha-usaha Indonesia dalam pembangunan nasional serta juga untuk meningkatkan citra Indonesia di kalangan anggota Organisasi Konperensi Islam.

MASALAH-MASALAH POKOK

A. BIDANG POLITIK

Disamping situasi politik dan ekonomi internasional yang memprihatinkan, maka perkembangan di Timur Tengah mengenai masalah Palestina, Libanon, PLO, Perang Iran-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Irak, Afghanistan, dan Cyprus, menunjukkan perkembangan yang membahayakan dan berkelanjutan. Masalah Palestina tetap merupakan masalah yang tidak terselesaikan sampai sekarang, terutama disebabkan karena ketidak sediaan pihak Israel yang selalu membangkang untuk mengakui hak-hak rakyat Palestina, menolak untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang diduduki sejak 1967 dan mengembalikan kota suci Al Quds, pertikaian antar negara Arab dan perpecahan dalam tubuh PLO yang semakin meluas; dan makin terlibatnya negara-negara "super powers" dalam rangka persaingan antar mereka di wilayah tersebut. Perang Irak-Iran yang masih berkelanjutan dapat membahayakan perdamaian dunia karena kepentingan banyak negara bagi terjaminnya penyediaan minyak dari Timur Tengah. Sedangkan usaha-usaha bagi penyelesaiannya masih tetap tidak berhasil, bahkan Iran telah menyatakan tidak akan menghadiri KTT di Casablanca.

Sementara itu pendudukan Rusia di Afghanistan terus berlanjut yang mendatangkan korban jiwa, harta dan penderitaan kepada rakyat Afghanistan, menuntut pula perhatian umat Islam untuk terus mengusahakan diakhirinya penderitaan tersebut.

Menghadapi keadaan internasional dan kawasan Timur Tengah demikian, hendaknya ;

1. Indonesia terus meningkatkan peranan aktif dalam usaha penyelesaian masalah Palestina.
2. Menghimbau negara-negara Arab termasuk rakyat Palestina untuk melupakan pertikaianya satu sama lain dan menjadikan perjuangan mengenai Palestina sebagai prioritas pertama demi untuk mengakhiri penderitaan rakyat Palestina dan untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan di wilayah Timur Tengah.
3. Indonesia tetap berusaha bersama-sama negara anggota lainnya untuk mencari penyelesaian sengketa Irak-Iran. Harus dijaga agar ketidak hadiran Iran tidak mendatangkan kelemahan lebih lanjut bagi Organisasi Konperensi Islam.
4. Dalam melaksanakan peranan Indonesia tersebut harus pula selalu dijaga agar Indonesia tidak ikut terlibat dalam pertikaian/perselisihan antara negara Arab dengan mengingak kepentingan nasional Indonesia.

B. EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA

Suasana perekonomian Internasional yang masih belum menggembirakan telah membawa pengaruh pada negara anggota Organisasi Konperensi Islam dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai anggota, termasuk sumbangan mereka untuk menunjang kegiatan pelaksanaan usaha-usaha kerjasama di bidang ekonomi dan sosial budaya. Pengalaman-pengalaman selama ini menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi dan sosial budaya. Kelemahan-kelemahan tersebut terutama disebabkan oleh karena rencana-rencana Organisasi Konperensi Islam di beberapa sektor selama ini masih terlalu ideal dan tidak menyesaikannya dengan kemampuan negara-negara anggotanya.

Dalam keadaan perkembangan yang demikian :

1. Partisipasi Indonesia dalam Organisasi Konperensi Islam hendaknya terus ditujukan agar Organisasi Konperensi Islam tetap merupakan faktor pendorong dalam menciptakan Tata Ekonomi Dunia Baru dan bagi kerjasama antara negara anggotanya.
2. Indonesia bersama negara anggota lain hendaknya berusaha kearah penyempurnaan Organisasi Konperensi Islam sehingga kegiatan-kegiatannya lebih terarah dan terpadu dengan memperhatikan kemampuan negara anggotanya.
3. Mengusahakan manfaat partisipasi Indonesia dalam Organisasi Konperensi Islam bagi menunjang pembangunan nasional Indonesia.

C. HAL-HAL LAIN

1. Masalah-masalah lain yang tidak dicantumkan dalam petunjuk ini, termasuk hal-hal khusus yang timbul dalam tiap-tiap mata acara Konpereasi Tingkat Tinggi IV di



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Casablanca, diserahkan keputusannya kepada Ketua Delegasi Indonesia sesuai garis kebijaksanaan politik luar negeri RI. Dalam hal-hal Delegasi RI sukar untuk menentukan sikap, sedapat mungkin Delegasi RI berkonsultasi terlebih dulu dengan Presiden.

2. Dalam waktu satu bulan setelah tiba kembali di Jakarta, Delegasi RI supaya menyampaikan laporan lengkap tentang hasil-hasil Konperensi tersebut kepada Presiden.

Jakarta, 12 Januari 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
S O E H A R T O